

ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl)

Sayed Muhammad Muliady *
Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H **
Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H. ***

ABSTRAK

Dana Desa selama ini belum dikelola dengan baik dan menjadi sumber pemicu korupsi di desa. Ketidakprofesionalan pengelolaan dana tersebut berasal dari minimnya pengetahuan dari kepala desa dan aparat desa untuk mengkonversi Dana Desa menjadi program atau kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Permasalahan yang dibahas tentang Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, akibat hukum bagi kepala desa yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan bagaimana upaya pencegahannya, pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh kepala desa pada putusan Nomor Studi Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Pemberian anggaran dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa. Dengan dalih untuk kepentingan desa, namun penggunaan dana tersebut seringkali terjadi korupsi yang sangat merugikan. Maka perlu penegakan hukum yang serius serta adanya pengawasan dan kolaborasi berbagai pihak. Akibat hukum Kepala Desa pelaku tindak pidana korupsi dikenakan sanksi sesuai dengan UU Tipikor, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3. Pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl, Kepala Desa dihukum dengan hukuman pidana, hal ini telah sesuai dengan ketentuan. Namun jika ditelaah lebih jauh hukuman yang dijatuhkan relatif rendah jika dibandingkan dengan dampak yang diakibatkan dari perbuatannya yang merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Korupsi, Dana Desa

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II

**LEGAL ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS
OF VILLAGE FUND CORRUPTION
(STUDY OF DECISION NUMBER 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl)**

Sayed Muhammad Muliady *
Dr. Panca Sarjana Putra, S.H., M.H **
Dr. Mukidi, S.E., S.H., M.H. ***

ABSTRACT

Village Funds have not been managed properly and have become a source of corruption in villages. This unprofessional management stems from the lack of knowledge among village heads and village officials on how to convert Village Funds into programs or activities that can improve community welfare.

The issues discussed include law enforcement against perpetrators of Village Fund Corruption, the legal consequences for village heads who commit village fund corruption and how to prevent it, and the judge's legal considerations in handing down a verdict against a village head for corruption in village funds, as outlined in Decision Study Number 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl.

The research method used is descriptive analytical, with a normative juridical approach. Library research was used as the data collection tool. Data analysis employed qualitative methods, producing descriptive-analytical data.

The allocation of village funds is a manifestation of the fulfillment of village rights. While purportedly for the benefit of the village, the use of these funds often leads to highly detrimental corruption. Therefore, serious law enforcement is needed, as well as supervision and collaboration from various parties. As a legal consequence, the Village Head who commits corruption is subject to sanctions in accordance with Law Number 31 of 1999 concerning Amendments to Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, specifically in Articles 2 and 3. In Decision Number 13/Pid.Sus/2021/PN Bgl, the Village Head was sentenced to criminal penalties, this is in accordance with the provisions. However, if examined further, the sentence imposed is relatively low when compared to the impact caused by his actions that harm the community.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Act, Corruption, Village Funds

* Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I

*** Dosen Pembimbing II